



Krisis Ekonomi di Banyumas 1930-1935 Sampai Perpindahan Pusat Pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto Tahun 1937

Diska Meizi Arinda[✉], Ufi Saraswati, Abdul Muntholib

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2017
Disetujui September 2017
Dipublikasikan Oktober 2017

Keywords:

the transfer of central government, economic crisis.

Abstrak

Perpindahan pusat pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto diakibatkan oleh krisis ekonomi tahun 1930-1935, karena kemampuan kas keuangan pemerintah Kolonial Belanda yang tidak mampu lagi untuk membiayai anggaran ekonomi akibat krisis ekonomi era tahun 1930an. Tujuan dari penelitian ini (1) Bagaimana kondisi krisis ekonomi di Banyumas tahun 1930-1935, (2) mengetahui dampak krisis ekonomi di Banyumas tahun 1935-1937. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup empat hal yaitu, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpindahan pusat pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto pada tahun 1937 diakibatkan oleh krisis ekonomi pada tahun 1930-1935 yang disebut dengan *Malaise*. Perpindahan pusat pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto memberikan dampak yang sangat baik karena yang sebelumnya berada di Banyumas dengan keadaan Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan tidak berkembang.

Abstract

The transfer of the central government from Banyumas to Purwokerto was caused by the economic crisis of 1930-1935, because of the financial capability of the Dutch colonial government which was no longer able to finance the economic budget due to the economic crisis of the 1930s era. The purpose of this research is (1) What is the condition of economic crisis in Banyumas 1930-1935, (2) How the impact of the economic crisis in Banyumas 1935-1937. This research used history research method that covered 4 things that were heuristic, source criticism, interpretation, and historiography. The data collection in this research covered book study, observation, interview, and document. The result of this research showed that the transfer of central government from Banyumas to Purwokerto in 1937 was caused by economic crisis in 1930-1935 that was called with Malaise. Transfer of government center from Banyumas to Purwokerto give a very good impact because previously located in Banyumas with Banyumas isolated by the mountains is not developed.

© 2017 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: sejarah@mail.unnes.ac.id

ISSN 2252-6633

PENDAHULUAN

Secara geografis wilayah Banyumas bukan merupakan daerah yang strategis tetapi lebih menunjukkan sebagai wilayah pedalaman yang terisolasi oleh pegunungan yang membentang baik di sepanjang bagian utara maupun selatan. Wilayah Banyumas diapit oleh dua jalur pegunungan Serayu Utara di sebelah Utara. Pegunungan Serayu Utara merupakan sambungan dari pegunungan Dieng di sebelah Timur Laut yang membujur ke arah Barat. Wilayah Banyumas juga dikenal dengan sebutan Lembah Serayu, kondisi tanahnya terdiri dari lapisan vulkanis muda yang subur dan sebagian berupa persawahan yang sangat luas dan sangat cocok untuk budidaya padi (Sukardi, 2014:11-12). Wilayah ini dahulu merupakan daerah mancanegara dari kerajaan-kerajaan Jawa sejak Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, Kartasura hingga Kasunanan Surakarta, setelah Perang Jawa (Perang Diponegoro 1825-1830) Kadipaten Banyumas dilepaskan dari kekuasaan Kasunanan Surakarta dan menjadi wilayah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tahun 1830 (Herusatoto, 2008:14).

Kabupaten Banyumas menjadi bagian daerah kekuasaan Kolonial dengan status sebagai Karesidenan pada tahun 1830. Fungsi penguasa tradisional tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan eksplorasi Kolonial melalui Sistem Tanam Paksa. Akibat dari Perang Diponegoro (1825-1830) pihak Kolonial mempunyai kesempatan yang begitu besar, baik di Kasunanan Surakarta maupun Kasultanan Yogyakarta. Banyumas dan Bagelen merupakan wilayah dari Kasunanan Surakarta kemudian Kediri dan Madiun merupakan wilayah dari Kasultanan Yogyakarta (Sukardi, 2014:41). Depresi ekonomi yang melanda dunia sebagai dampak Perang Dunia I baru mencapai puncaknya pada 1929 dengan jatuhnya saham-saham di bursa efek New York. Bagi Hindia Belanda hal ini berarti bangkrutnya perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah. Akibat depresi umum di seluruh dunia maka pada 1933 pabrik-pabrik Kalibagor, Klampok, Sumpuhi, Purwokerto, dan Bojong semua ditutup.

Keadaan masyarakat di Karesidenan Banyumas sangat memprihatinkan, keadaan yang demikian sulit membuat banyak orang menjadi pengemis untuk minta sedekah. Hal serupa terjadi pada kas keuangan pemerintah Hindia Belanda berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi krisis keuangan pemerintah antara lain mereskrongraksi sistem birokrasi yang ada serta melakukan pemotongan gaji pegawai negeri. Gaji pegawai negeri tidak dibayarkan sepenuhnya karena dipotong untuk mengisi kas Negara, Selain itu pemerintah Kolonial juga mengadakan penyelidikan mengenai kemungkinan penghapusan dan penggabungan beberapa Kabupaten. Termasuk rencana ini ialah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purwokerto, usulah pemindahan Ibukota Kabupaten dan Karesidenan dilakukan oleh Residen Banyumas H. G. F. van Huls (Margana, dkk, 2010:26-27).

Krisis ekonomi ini disebut dengan zaman *Malaise* yaitu karena setiap usaha selalu mleset (gagal) tidak ada hasilnya. Kelesuan pasar dunia terutama terhadap kepentingan bahan mentah, menyebabkan ekonomi Hindia Belanda menyandarkan devisa negaranya pada ekspor bahan-bahan mentah (pertanian-perkebunan). Kondisi seperti ini berdampak pula di daerah Banyumas. Penggabungan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purwokerto disebabkan oleh kemampuan keuangan pemerintah Kolonial yang tidak mampu lagi membiayai anggaran ekonomi era tahun tiga puluhan yang terkenal dengan sebutan zaman *malaise* (Wijono dkk, 2002:5-7). Perkembangan sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Banyumas menunjukkan adanya kesenjangan karena pembangunan infrastruktur hanya terpusat di daerah tertentu saja. Pembangunan hanya untuk kegiatan ekonomi yang menguntungkan bagi Hindia Belanda, faktor geografis menjadi sebab-sebab kepentingan tersebut. Sungai serayu telah menjadikan pusat pemerintah Banyumas yaitu Banyumas terisolasi dengan daerah lainnya. Hal ini membuat Banyumas ketimpangan dengan daerah lainnya. Purwokerto kemudian menjadi aktifitas masyarakat karena dengan adanya pabrik gula,

tempat rekreasi, dan pasar wage sebagai pusat ekonomi dan bebrbagai fasilitas lain yang lebih lengkap dibandingkan dengan daerah lain (Santoso, 2008:176).

Penghematan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis keuangan dengan menggabungkan serta memindahkan Ibukota Kabupaten dan Karesidenan Banyumas dianggap bertentangan dengan sebuah tradisi. Bagi masyarakat yang kontra dengan usulan pemindahan tersebut hal ini merupakan sebuah kerugian, Mr. Bartling seorang anggota Dewan Kabupaten Banyumas yang kontra terhadap usulan pemindahan Ibukota secara terang-terangan menyebut bahwa jika Kabupaten Banyumas dipertahankan sebagai Ibukota hal tersebut tidak hanya mengakibatkan kemunduran wilayah. Di bangunnya jalur kereta api yang melewati Kota Purwokerto kemudian Purwokerto dianggap secara ekonomi lebih strategis dibandingkan dengan Banyumas karena di Banyumas kemungkinan perekonomian sulit untuk berkembang maka pusat pemerintahan yang semula berada di Kabupaten Banyumas dipindahkan ke Purwokerto pada 1 Januari 1936 kemudian Gapura Si Panji di boyong ke Purwokerto dan diresmikan dan dipindahkan ke Purwokerto pada 7 Januari 1937 secara otomatis Kabupaten Purwokerto di hapus pada dan di gabungkan dengan Kabupaten Banyumas (Margana dkk, 2010:28).

METODE

Sebagai kajian sejarah, penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mencakup empat langkah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1986:34). Menurut terminologinya heuristik (*heuristic*) berasal dari bahasa Yunani heuristiken mengumpulkan atau menemukan sumber (Pranoto, 2010:29). Pengumpulan data dalam studi ini didapatkan melalui metode penelitian dengan teknik pengumpulan data dari proses penggalian sumber-sumber sejarah yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa arsip, surat kabar, dan foto yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia,

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan Reksa Pustaka, sedangkan sumber sekunder adalah sumber lisan, yaitu pelaku sejarah yang terlibat dalam Perpindahan Pusat Pemerintahan akibat Krisis Ekonomi di Banyumas, contohnya pelaku sejarah pada zaman tersebut, penggiat sejarah.

Tahapan kedua adalah melakukan kritik sumber terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang masalah otentisitas yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang masalah kredibilitas melalui kritik intern. Setelah melalui tahapan kritik sumber, kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh melalui arsip, buku, maupun hasil penelitian di lapangan. Tahap ini sangat penting agar penulis terhindar dari subjektivitas. Historiografi merupakan langkah terakhir setelah ketiga prosedur yang lain telah dipenuhi. Historiografi merupakan penulisan kembali peristiwa sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyumas Tahun 1831-1930

Kota Banyumas merupakan salah satu Kota di Lembah sungai Serayu yang memiliki hulu di Pegunungan Dieng serta bermuara di Samudera Hindia. Sungai Serayu membelah wilayah Karesidenan Banyumas sehingga cukup menyulitkan untuk menjangkau wilayah-wilayah tertentu. Kota kecil ini selain dikelilingi Pegunungan Serayu juga dikelilingi oleh sungai-sungai. Sungai serayu mengalir di sebelah timur dan utara Kota sementara Kaligawe sungai yang lebih kecil mengalir di barat Kota. Batas sebelah utara dan timur ialah Sungai Serayu, sementara batas sebelah selatan ialah Kemranjen dan batas sebelah barat ialah onderdistrik Patikraja (Margana dkk, 2010:10).

Wilayah Banyumas bukan merupakan daerah yang strategis tetapi lebih menunjukkan sebagai wilayah pedalaman yang terisolasi oleh pegunungan yang membentang baik di sepanjang bagian utara maupun selatan. Wilayah Banyumas diapit oleh dua jalur pegunungan

Serayu Selatan di sebelah selatan dan pegunungan Serayu Utara merupakan sambungan dari pegunungan Dieng disebelah Timur Laut yang membujur kearah Barat. Gunung Slamet merupakan puncaknya dengan ketinggian mencapai 3428 meter di atas Permukaan Laut. Dengan melihat kondisi geografis maka dapat dinyatakan bahwa daerah inti Banyumas merupakan wilayah yang sangat menarik bagi pihak Kolonial yang sejak 1830 berkuasa di daerah itu. Persawahan yang subur dengan pengairan alami yang memadai merupakan potensi yang sangat menjanjikan keuntungan besar melalui eksploitasi yang bersifat ekonomi. Sesuai dengan pertimbangan itulah maka Banyumas sangat tepat untuk dieksploitasi melalui kebijakan Sistem Tanam Paksa (Sukardi, 2014:11-13).

Karakteristik masyarakat Banyumas dapat digambarkan sebagai masyarakat yang masih memiliki keunikan budaya lokal yang khas, budaya yang berkembang saat ini merupakan proses keberlangsungan nilai-nilai yang berorientasi pada generasi pendahulunya. Untuk memahami kehidupan masyarakat di Kabupaten Banyumas tidak lepas dari studi historis untuk memahami sejarah masyarakat petani dengan segala persoalan yang melingkupinya (Sukardi, 2014:3). Krisis tahun 1930an merupakan puncak perubahan-perubahan yang terjadi akibat perang dalam hubungan ekonomi antara Eropa dan Asia dengan akibat lanjutannya dalam hubungan sosial dan politik. Tahun-tahun setelah depresi pasca perang tampaknya makmur. Perkebunan karet baik Eropa maupun pribumi mendapatkan keuntungan besar dari skema pembatasan steveson yang tidak diikuti Hindia Belanda. Terjadinya krisis dengan gagalnya panen yang luas, kemudian krisis di Wall Street langsung menimbulkan kejatuhan besar harga produk pertanian yang dijual Hindia sementara harga barang manufaktur yang dibeli Hindia tidak turun secepat atau sebanyak itu. tahun 1930 volume ekspor rmasih lebih besar daripada tahun 1928 walaupun dengan harga $\frac{3}{4}$ sebelumnya (Furnivall, 1937:451-452).

Mata pencaharian atau lapangan usaha penduduk di sektor pertanian seluruhnya

diarahkan kepada usaha-usaha peningkatan produksi pertanian menuju swasembada pangan. Peningkatan dimaksud direalisir melalui usaha-usaha peningkatan produksi padi, palawija, hortikultura, dan perluasan areal tanaman pangan. Usaha penduduk di sektor perkebunan diarahkan untuk peningkatan produksi tanaman perkebunan melalui Panca usaha dan intensifikasi. Tanaman perkebunan yang dikembangkan penduduk Kabupaten Banyumas adalah tanaman cengkeh, kelapa, kopi, teh, tebu, dan rosella. Sedangkan usaha penduduk di bidang pertenakan dengan jenis ternak besar, ternak kecil dan unggas dengan penekanan pada hasil daging dan telur. Usaha peningkatan di bidang pertenakan diupayakan juga untuk meningkatkan populasi ternak di samping untuk peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan pendapatan pertenakan. Di bidang perikanan usahanya dengan jenis produksi berupa jenis ikan kultur, ikan liar, udang, dan alat perikanan dengan lebih bercorak pada jenis produksi perikanan darat (air tawar). Sebagian penduduk Kabupaten Banyumas juga bergerak di lapangan/sektor industri, karena di Kabupaten Banyumas mempunyai 70 buah industri besar dan sedang juga terdapat 549 buah industri kecil termasuk di dalamnya perusahaan makanan, minuman, pakaian jadi, alat-alat rumah tangga, hasil barang dari kayu, dan hasil galian bukan logam (Adisarwono, 1985:139).

Krisis Ekonomi di Banyumas Tahun 1930-1935

Keadaan ekonomi yang buruk dan keresahan sosial yang semakin meluas bertambah dengan adanya krisis pabrik gula 1918, krisis ekonomi 1921 dan kenaikan pajak rakyat. Laporan yang dikerjakan oleh Mayor Rannef disebutkan bahwa sejak Fock menjabat tahun 1921 menggantikan Gubernur Jendral van Limburg Stirum, pajak rakyat di Jawa dan Madura dinaikkan sekitar 40%. Kondisi ekonomi rakyat dan keadaan sosial yang semakin buruk itu berlanjut, bahkan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan de Jonge tahun 1931-1936. Menurut Vries tahun 1985 bahwa depresi ekonomi dunia atau krisis besar dunia tahun 1929 membawa pengaruh buruk terhadap Negeri-

negeri seberang lautan termasuk Indonesia yang merupakan pghasil bahan mentah. Harga beras, jagung dan umbi-umbian merosot dengan bahan-bahan ekspor, dinyatakan oleh Wertheim kemrosotan harga hasil pertanian telah mengakibatkan kemelaratan penduduk (Utomo, 1995:78-79)

Krisis 1929 merupakan puncak perubahan-perubahan yang terjadi akibat perang dalam hubungan ekonomi antara Eropa dan Asia dengan akibat dalam hubungan sosial dan politik. Produksi berkembang pasar menyusut khususnya untuk produk utama Jawa yaitu gula, sementara itu pinjaman yang dilakukan pemerintah dengan tingkat bunga tetap masih harus dibayar walaupun ada penurunan nilai hasil bumi Jawa. Kemudian pada 1929 yaitu ada gagal panen yang luas, reaksi pertama terhadap depresi upaya menutup harga-harga yang lebih rendah dengan meningkatkan produksi da nada peningkatan produksi pertanian. Mulai tahun 1931 negeri-negeri lain tidak mau lagi mengimpor barang bagaimanapun murahnya dan sebanyak Hindia Belanda menurunkan harga barangnya (Furnivall, 1939:452-465).

Perkembangan perekonomian di Hindia Belanda hanya menggambarkan keberhasilan Belanda dalam misinya mendapatkan keuntungan besar. Krisis pada tahun 1930an sebagai sebuah musibah terhadap ekonomi Kolonial, karena Indonesia pada masa Kolonial merupakan ekonomi yang mengekspor barang-barang pertanian dan bahan mentah juga termasuk dalam kategori Negara yang berhutang. Harga-harga produk ekspor turun dengan cepat dan tajam secara bandingan lebih besar daripada harga produk-produk yang diimpor yang mengantar pada kemunduran dalam dasar penukaran (*terms of trade*) bagi Indonesia pada masa Kolonial (Linblad, 2002:79).

Krisis ekonomi atau malaise tahun 1929 dan yang diikuti oleh suatu masa depresi ekonomi yang cukup lama di Hindia Belanda terjadi karena pemerintah Kolonial Hindia Belanda menolak segalah tindakan devaluasi terhadap gulden. Krisis dan malaise ekonomi menimpa perusahaan-perusahaan, usahawan-usahawan, petani-petani dan menyebabkan

penutupan berbagai lapangan industry, akibat depresi ekonomi tersebut kemalasan dan sikap apatis dalam usaha diantara rakyat. Ketika terjadi krisis buruh-buruh, perusahaan diberhentikan secara besar-besaran (Utomo, 1995:154).

Krisis tahun 1930an merupakan puncak perubahan-perubahan yang terjadi akibat perang dalam hubungan ekonomi antara Eropa dan Asia dengan akibat lanjutannya dalam hubungan sosial dan politik. Tahun-tahun setelah depresi pasca perang tampaknya makmur. Perkebunan karet baik Eropa maupun pribumi mendapatkan keuntungan besar dari skema pembatasan steveson yang tidak diikuti Hindia Belanda. Terjadinya krisis dengan gagalnya panen yang luas, kemudian krisis di Wall Street langsung menimbulkan kejatuhan besar harga produk pertanian yang dijual Hindia sementara harga barang manufaktur yang dibeli Hindia tidak turun secepat atau sebanyak itu. tahun 1930 volume ekspor rmasih lebih besar daripada tahun 1928 walaupun dengan harga $\frac{3}{4}$ sebelumnya (Furnivall, 1937:451-452).

Situasi tahun-tahun ini hampir mirip dengan situasi sekarang dimana krisis ekonomi yang berkepanjangan. Orang Eropa menyebut situasi krisis ekonomi berkepanjangan tahun 1930an dengan “*malaise*” orang Jawa memlesetkan dengan istilah jaman *mleset*. Karena setiap usaha perekonomian seperti berdagang atau usaha lain seperti penanaman tanaman perkebunan selalu mleset atau gagal tidak ada hasilnya. Kelesuan pasar dunia terutama terhadap kepentingan bahan mentah, menyebabkan ekonomi Hindia Belanda dalam posisi yang amat sulit. Hal ini terjadi karena kawasan Hindia Belanda menyandarkan devisa negaranya pada ekspor bahan-bahan mentah (pertanian-perkebunan). Pada tahun ini kemiskinan terjadi dimana-mana di hampir setiap daerah Banyumas di jalan-jalan di perkotaan seperti di Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap dan Purbalingga pengemis laki-laki perempuan bahkan anak-anak berkeliaran terutama pada hari minggu (Wijono, 2007:1).

Tahun 1930-1935 kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah Banyumas, di daerah perkotaan seperti di Purwokerto, Banjarnegara,

Cilacap. Dan Purbalingga pengemis laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak berkeliaran terutama pada hari minggu. Sumber mata pencaharian di pabrik-pabrik, perkebunan, serta perburuhan hilang lenyap, rakyat Banyumas jatuh dalam kemiskinan secara bersama-sama. Karena terus-menerus kekurangan makanan rakyat Banyumas menderita kekurangan gizi. Akibatnya gampang terserang berbagai penyakit terutama penyakit kulit seperti gudug, koreng, patek, dan borok. Penyakit influenza dan malaria juga menyerang rakyat. Korban meninggal berjatuhan dimana-mana, bongkrek menjadi makanan favorit tetapi tidak jarang membuat orang keracunan sampai meninggal (Wijono dkk, 2002:7).

Dampak Krisis di Banyumas Tahun 1935-1937

Modernisasi Kota Purwokerto yang diwujudkan dengan pengoperasian kereta api di sepanjang Lembah Sungai Serayu ibarat lokomotif yang menarik perubahan yang dahsyat bagi wilayah Banyumas. Kemajuan dalam bidang transportasi telah membawa perubahan yang sangat nyata pada pola geografis wilayah ini serta mempengaruhi pola perkembangan Kota. Perubahan yang signifikan yang pertama terjadinya proses pengkotaan yang sangat pesat bagi wilayah-wilayah yang strategis bagi jaringan transportasi, namun demikian dengan adanya transportasi ada sebagian di Karesidenan Banyumas Kota menjadi mati (Basundoro dkk, 2000:50). Banyumas tidak hanya disebabkan semakin sepi akibat infrastuktur transportasi yang tidak mendukung alasan yang lain yaitu karena Banyumas sering dilanda banjir dari Sungai Serayu, banjir ini disebabkan karena letak Kota yang sama tingginya dengan Sungai Serayu meluap sampai ke Kota. Banjir paling besar sebelum Ibukota dipindah terjadi pada tanggal 21-23 Februari 1861 ketika air masuk ke Kota sampai 3,5 m. Karena alasan-alasan yang ada ditambah dengan infrastuktur yang lebih lengkap di Purwokerto maka kantor-kantor cabang perdagangan dan perusahaan sasta di Karesidenan Banyumas lebih memilih untuk berkedudukan di Purwokerto (Basundoro dkk, 2000:37).

Pentingnya transportasi bagi perkembangan Banyumas setelah adanya kereta api di Purwokerto perlahan mengalami kemajuan. Tidak ada satu jalur kereta api yang melintas di Kabupaten Banyumas padahal Banyumas memegang peran penting dalam bidang ekonomi maupun politik karena menurut Gandasubrata yang pada waktu itu Bupati Banyumas, walaupun Kabupaten Banyumas terletak di Lembah Sungai Serayu tetapi secara geografis terletak pada posisi yang sulit. Hampir seluruh tepian yang mengelilingi Kabupaten Banyumas pegunungan yang terjal. Walaupun Kabupaten Banyumas fasilitas perkotaan mencukupi seperti jalan yang bagus, listrik, air tetapi jalur kereta api tidak melintas di Kabupaten Banyumas tetapi menjadi Kabupaten yang sepi. Bahkan Gandasubrata juga mengatakan Kabupaten Banyumas tidak memenuhi syarat lagi menjadi Ibukota Karesidenan (Gandasubrata, 1952:25).

Penghematan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis keuangan dengan menggabungkan serta memindahkan Ibukota Kabupaten dan Karesidenan Banyumas dianggap bertentangan dengan sebuah tradisi. Bagi masyarakat yang kontra dengan usulan pemindahan tersebut hal ini merupakan sebuah kerugian, Mr. Bartling seorang anggota Dewan Kabupaten Banyumas yang kontra terhadap usulan pemindahan Ibukota secara terang-terangan menyebut bahwa jika Kabupaten Banyumas dipertahankan sebagai Ibukota hal tersebut tidak hanya mengakibatkan kemunduran wilayah. Wilayah sekitar yang disangganya, selain itu faktor psikologi dan politik harus turut dipertimbangkan dalam memutuskan pemindahan Ibukota ke Purwokerto. Residen maupun Bupati Banyumas telai setuju dengan rencana pemindahan itu, sebelum keputusan mengenai pemindahan Ibukota Kabupaten mcapai hasil R. A. A. Cokroadisuryo Bupati Kabupaten Purwokerto meminta diberhentikan dari jabatannya karena usia lanjut. Masalah lain yang timbul adalah R.A.A. Cokroadisuryo tidak memiliki keturunan sehingga terjadi kekosongan jabatan Bupati di Kabupaten Purwokerto. Akhirnya keputusan

akhir disepakati yaitu memindahkan Ibukota Kabupaten dan Karesidenan Banyumas ke Kota Purwokerto, Kota Banyumas hanya menjadi *Distrik* (Margana dkk, 2010:28-29).

Purwokerto kemudian menjadi Kota yang ramai tidak hanya sebagai pusat kegiatan perekonomian tetapi juga menjadi pusat pemerintahan, usaha untuk menata Kota Purwokerto kemudian dilakukan dan dimulai dari pusat Kota yaitu disekitar alun-alun. Gedung ketoprak yang berada ditengah alun-alun dan berada didepan masjid kemudian dipindahkan ke pasar manis dan dijadikan bangunan serba guna, kemudian penataan jalan Kota yang dimulai dari sekitar stasiun SDS sampai ke kantor assisten Residen. Ditepi jalan di bangun pertokoan, jalan yang diperlebar yaitu karanganjing mulai dari rumah sakit Zending ke Utara dibuat dua arah dengan trotoar. Jalan Kota yang dikelola semula oleh Desa dan jalan tersebut tergolong ramai kemudian selanjutnya pengelolanya dilanjutkan oleh pemerintah Kabupaten. mengingat Kabupaten Banyumas yang semakin karena Kota yang ditinggalkan baik dari aktifitas ekonomi maupun aktifitas pemerintahan maka kantor dan rumah Residen dipindahkan ke Purwokerto. Residen Banyumas yang terakhir tingga di Kabupaten Banyumas yaitu Mr. J. Ruys kemudian dipindahkan ke Purwokerto pada tahun 1939 dan tinggal di rumah baru di dukuh Sitapen (Gandasubrata, 1952: 8-29).

Kota Purwokerto sudah menjadi kota yang jauh lebih ramai dari Banyumas yang merupakan Ibukota Karesidenan Banyumas, di Purwokerto untuk pertama kali dari seluruh wilayah yang berada di Karesidenan Banyumas berdiri perusahaan angkutan autobus milik orang Cina. Pada tahun 1922 mulai beroperasi untuk umum bermodal 5 bus dengan tiga arah trayek yaitu Selatan Purwokerto, Patikraja, Cilacap Timur Purwokerto, Purbalingga, Klampok kemudian Barat Purwokerto, Ajibarang, Wangon. Awalnya dengan adanya autobus ini kurang diminati oleh masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan trem maupun kereta api (Mulyasari, 2014:617).

Kemerosotan ekonomi yang terjadi pada krisis *malaise* mendorong pemerintah Kolonial

untuk melakukan penghapusan dan penggabungan wilayah di Jawa Tengah. Penggabungan wilayah dilakukan di beberapa di Kabupaten yaitu Kabupaten Batang dengan Pekalongan, Kabupaten Kutoarjo dengan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purwokerto dengan Kabupaten Banyumas. Pada saat itu juga adanya kekosongan Bupati di Purwokerto karena Bupati yang sebelumnya meminta untuk diberhentikan jabatannya sudah lanjut usia dan Bupati tidak memiliki keturunan, sehingga Kabupaten Purwokerto digabungkan dengan Kabupaten Banyumas.

Pendopo dipindahkan melalui jalan yang jauh memutar, pengangkutan soko guru si panji dilakukan kearah Timur menyusuri sungai Serayu tanpa menyebranginya, melalui Wonosobo terus kearah Utara melalui Karesidenan Pekalongan keudian meju Purwokerto. Setelah semua di Kota Purwokerto siap maka pada tanggal 5 Maret 1937 Bupati Banyumas yang saat itu dijabat oleh S.M Gandasubrata beserta keluarganya pindah dari Banyumas ke Purwokerto. Residen yang masih harus tinggal di Banyumas karena rumah Residen masih dibangun. Kemudian tahun 1939 pembangunan rumah Residen selesai, Residen Banyumas pada waktu itu dijabat oleh Mr. J. Ryus pidah ke Purwokerto. Agar Banyumas yang sudah semakin sepi sejak banyaknya infrastruktur Kota Purwokerto dibangun, tidak seperti Kota yang mati karena tidak lagi menjadi pusat pemerintahan. Maka beberapa fasilitas di Purwokerto yang dipindahkan ke Banyumas salah satunya yaitu sekolah Mantri Kesehatan yang dipindahkan ke Banyumas 1 April 1936. Sekolah yang semula berada di jalan Gereja setelah dipindahkan ke Banyumas kemudian menjadi milik pemerintah mulai tahun 1937. Nampaknya usaha tersebut tidak berhasil dengan baik, karena pada kenyataannya Banyumas tidak pernah lagi ramai (Margana dkk, 2010:30-31).

Perpindahan pusat pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto menyebabkan Banyumas tidak lagi berstatus sebagai Ibukota Kabupaten maupun Ibukota Karesidenan. Setelah perpindahan Banyumas hanya berstatus

sebagai distrik dan Ibukota Kecamatan Banyumas. Banyumas bertambah sepi setelah adanya perhubungan kereta api dari Cirebon ke Jogjakarta dan Surabaya melalui Purwokerto dan Kroya, bagi Kota Purwokerto pembukaan kereta api berarti menunjukkan kemajuan yang sangat besar. Penduduknya bertambah banyak kemudian berturut-turut didirikan Sekolah Normaal, MULO, Kweekschool, Ambachtschool dan sekolah mantra kesehatan. Purwokerto juga menjadi pusat Zending dan Missie yang dengan giat mendirikan gereja-gereja, sekolah-sekolah dan rumah-rumah (Gandasubrata, 1952:21).

Kota Purwokerto memiliki sarana infrastruktur lebih lengkap dibandingkan Banyumas semenjak adanya jaringan trem an kereta api memasuki periode baru dalam sejarahnya ykni menjadi Ibukota Kabupaten dan Karesidenan Banyumas yang baru. Salah seorang pegawai mengetahui bahwa Banyumas tidak dilewati oleh jalur trem dan kereta api, beliau meramalkan bahwa Banyumas tidak akan lama bertahan sebagai Ibukota Karesidenan. Setelah dipindahkan pusat pemerintah dari Banyumas ke Purwokerto perekonomian semakin membaik karena sudah ada jalur kereta api, dan di Purwokerto banyak infrastruktur yang mendukung untuk berlangsungnya masyarakat di Banyumas dan sekitarnya. Dan setelah adanya jalur kereta api Banyumas semakin ditinggalkan karena Banyumas yang terisolasi oleh Pegunungan serayu dan tidak dilewati jalur kereta api. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Banyumas setelah perpindahan pusat pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto, Kota Banyumas tetap lambat perekonomian tetapi secara keseluruhan kabupaten Banyumas naik karena Kota Purwokerto perekonomian bergerak sangat cepat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih baik karena sudah mempunyai mata pencaharian (Margana dkk, 2010:19).

SIMPULAN

Banyumas wilayah kekuasaan Kolonial Belanda dengan status sebagai Karesidenan pada

tahun 1830, Banyumas merupakan wilayah *Mancanegara killen dari Kasunanan Surakarta*. Sejak tahun 1830 Kabupaten Banyumas di eksploitasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda secara politik dan sosial ekonomi, maka tahun 1830 merupakan era baru dalam kehidupan politik dan sosial ekonomi. Pihak Kolonial Belanda menetapkan sistem tanam paksa di Banyumas tahun 1830-1835, dalam sistem tanam paksa ini masyarakat Banyumas diutamakan menanam jenis tanaman yang dapat menghasilkan barang-barang komoditi ekspor bagi pasaran Eropa. Purwokerto lebih ramai dan infrastruktur yang memadai dibandingkan dengan Banyumas karena di Purwokerto ada jalur kereta api dan trem yang dibangun oleh Kolonial Belanda untuk jalur transportasi darat pengangkutan hasil bumi pada masa sistem tanam paksa tahun 1830-1835. Kemudian kekurangan paling utama di Banyumas yaitu lokasinya dikelilingi oleh Pegunungan sehingga pada saat modernisasi transportasi di Hindia Belanda yang ditandai dengan pembangunan jalur kereta api dan trem tetapi Banyumas tidak tersentuh dalam proses modernisasi tersebut. Inilah awal dari kemunduran yang kemudian di akibatkan oleh krisis ekonomi dunia atau yang disebut dengan *malaise* pada tahun 1930an. Banyumas menjadi Ibukota Karesidenan tidak dapat bertahan lama karena zaman modern yang mengandalkan teknologi. Karena tidak adanya sarana transportasi yang dapat memperlancar pengiriman barang dan jasa sebagai syarat utama aktivitas ekonomi berakibat sangat fatal bagi eksistensi sebuah Kota.

Perpindahan pusat pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto sebelumnya dilakukan ada penggabungan Kabupaten antara Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purwokerto dihapus kemudian Kota Purwokerto ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Banyumas dan sebagai Ibukota Karesidenan Banyumas setelah dikurangi *distrik* Purworejo (Klampok) dan kemudian digabungkan dengan Kabupaten Banjarnegara. Karena digabungkan kedua Kabupaten ini yaitu Pemerintah Kolonial Belanda yang tidak sanggup lagi membiayai Purwokerto pada 1 Januari 1936 menjadi

Kabupaten Banyumas Ibukota Purwokerto, dan kemudian diikuti dengan perpindahan pusat pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto pada 7 Januari 1937 dengan dipindahkannya pendopo si panji dan Purwokerto menjadi Ibukota Karesidenan Banyumas.

Perpindahan pusat pemerintahan yang semula berada di Banyumas kemudian dipindahkan ke Purwokerto akibat krisis ekonomi yang melanda di Banyumas itu pemerintah Kolonial Belanda berupaya untuk melakukan penghematan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis keuangan dengan menggabungkan serta memindahkan Ibukota Kabupaten dan Karesidenan Banyumas dianggap bertentangan dengan sebuah tradisi. Penggabungan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purwokerto disebabkan oleh kemampuan kas keuangan pemerintah Kolonial Belanda yang tidak mampu lagi untuk membiayai anggaran ekonomi akibat krisis ekonomi era tahun 1930an.

Mulyasari, Prima Nurahmi. 2014. *Modernisasi dan Tata Ruang Kota Purwokerto 1900-1935*. Yogyakarta: Patrawidya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisarwono. 1985. *Riwayat Banyumas*. Banyumas.
- Basundoro, Purnawan. 2000. "Transportasi dan Eksplorasi Ekonomi di Karesidenan Banyumas tahun 1830-1940". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Furnivall, Jhon S. 1937. *Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk*. Cambridge University Press.
- Herusatoto, Budiono. 2007. *Banyumas: Sejarah, Budaya, Bahasa dan Watak*. Yogyakarta: LKIS
- Lindblad, J. Thomas. 2002. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Margana, Sri dan M. Nursam. 2010. *Kota-Kota Di Jawa Identitas Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Santoso, Jo. 2008. *Arsitektur Kota Jawa: Kosmos, Kultur & Kuasa*. Jakarta. Centropolis.
- Sukardi, Tanto. 2014. *Tanam Paksa di Banyumas*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Wijono Soegeng, dkk. 2002. *Banjoemas Riwajatmoe Doeoe*.
- Utomo, Cahyo Budi. 1995. *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan*. Semarang. IKIP Semarang Press.
- Wijono, Soegeng. 2007. *Sejarah Banyumas*. Banyumas.
- Gandasubrata, SM. 1952. *Kenang-kenangan 1933-1950 Bagian I*. Purwokerto: Seraju.